

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto (trans.)). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Maulana Media Grafika.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wijaya, H. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
- Astuti, Y., & Utomo, I. H. (2021). Inovasi Aplikasi “Telunjuk Sakti” Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan

- Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 446–460.
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI*, 2(02), 14–27.
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 65–85.
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 657–666.
- Lokabora, M. Y., & Fithriana, N. (2018). Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 64–69.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33–38.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 01(14), 53–59.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penetapan Telunjuk Sakti dan Anak Lantip Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Melalui Android/Web Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 Tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Website

Hartono, R. (2021). *Ini Hebatnya Telunjuk Sakti Pemkab Wonogiri yang Dipuji Dirjen Dukcapil*. Solopos. <https://www.solopos.com/ini-hebatnya-telunjuk-sakti-pemkab-wonogiri-yang-dipuji-dirjen-dukcapil-1127551?>